

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan,

Awal nya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan kepada kami sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tenggarong Seberang, 08 Desember 2025

Kepala Pelaksana,



SETIANTO NUGROHO AJI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	54
4.1 Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.....	54
4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	55
4.3 Perumusan Program Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD.....	59
4.4 Rencana Program dan Kegiatan.....	59
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.....	75
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	75
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel. T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024_Kabupaten Kutai
Kartanegara 13

Tabel. T-C. 30

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah_Kabupaten
Kutai Kartanegara 22

Tabel. T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 26

Tabel. T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2026 Kabupaten Kutai Kartanegara 36

Tabel. 5

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BPBD Kabupaten
Kutai Kartanegara 2021-2026..... 49

Tabel. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2026_Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Rancangan_Kabupaten Kutai
Kartanegara 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.

Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2014. Permendagri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, seluruh PD di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan pada RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah maka pelaksanaan pembangunan tahun Kedua RPJMD 2021-2026 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni“ :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Sebagai langkah upaya penyempurnaan matrik struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil

dari penyusunan ini akan di implementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 .

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 , peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
11. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829);
12. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830);
13. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Mendagri Nomor 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
16. Peraturan Mendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.....
19. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 ;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2026 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 , adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program dan kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ;
2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan
Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan
Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Faktor yang menjadi Bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan
- 4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan
- 4.3. Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD
- 4.4. Rencana program dan kegiatan

Bab V Penutup

- 5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Lampiran – lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 , disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan, untuk menjamin setiap alokasi anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya

**Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
(RENJA) tahun n-2 dan Capaian Renstra Tahun 2024 :**

Tabel. T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Senja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	-																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			91,847,604,876		38,371,178,639		27,134,005,652		-				40,568,496,589				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,250,000,000		864,526,200		450,000,000		-				864,526,200				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	1,000,000,000	14	396,742,400	7	200,000,000			0.00%	0.00%	14.00	396,742,400	40.00%	39.67 %	BPBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	500,000,000	24	184,159,300	12	100,000,000			0.00%	0.00%	24.00	184,159,300	40.00%	36.83 %	BPBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25	750,000,000	5	283,624,500	2	150,000,000			0.00%	0.00%	5.00	283,624,500	20.00%	37.82 %	BPBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48,282,940,126		22,713,785,589		13,546,694,126	-	-	-	-	-	22,713,785,589	-		-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5,280	46,082,940,126	2470.00	21,841,109,819		13,125,745,126			0.00%	0.00%	2470.00	21,841,109,819	46.78%	47.40 %	BPBD	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70	400,000,000	21.00	159,861,500		86,000,000			0.00%	0.00%	21.00	159,861,500	30.00%	39.97 %	BPBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	1,800,000,000	32.00	712,814,270		334,949,000			0.00%	0.00%	32.00	712,814,270	53.33%	39.60 %	BPBD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			850,000,000		-		150,000,000	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	450	850,000,000	0.00	-		150,000,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,990,000,000		362,963,900		138,025,000	-	-	-	-	-	362,963,900	-		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya	450	850,000,000	550.00	192,590,900					0.00%	0.00%	550.00	192,590,900	122.22 %	22.66 %	BPBD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	450	550,000,000	0.00	-		72,025,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	290,000,000	250.00	170,373,000		66,000,000			0.00%	0.00%	250.00	170,373,000	83.33%	58.75 %	BPBD	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	300,000,000	0.00	-					0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,577,500,000		1,861,572,401		834,040,000	-	-	-	-	-	1,861,572,401	-	-	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500	52,500,000	200.00	20,977,000		10,500,000			0.00%	0.00%	200.00	20,977,000	40.00%	39.96 %	BPBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8,500	550,000,000	5700.00	264,242,770		173,540,000			0.00%	0.00%	5700.00	264,242,770	67.06%	48.04 %	BPBD	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	600	310,000,000	120.00	49,840,000	-	0.00%	0.00%	120.00	49,840,000	20.00%	16.08 %	BPBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14,450	475,000,000	4850.00	167,091,000	100,000,000	0.00%	0.00%	4850.00	167,091,000	33.56%	35.18 %	BPBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	37,500	425,000,000	10500.00	104,908,000	50,000,000	0.00%	0.00%	10500.00	104,908,000	28.00%	24.68 %	BPBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,950	290,000,000	0.00	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	1,650,000,000	86.00	1,063,307,557	350,000,000	0.00%	0.00%	86.00	1,063,307,557	49.14%	64.44 %	BPBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	475,000,000	225.00	115,346,074	75,000,000	0.00%	0.00%	225.00	115,346,074	45.00%	24.28 %	BPBD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60	350,000,000	24.00	75,860,000	75,000,000	0.00%	0.00%	24.00	75,860,000	40.00%	21.67 %	BPBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,000,000,000		1,838,697,137	6,025,000,000	-	-	-	4,036,015,087	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	360	10,500,000,000	75.00	2,197,317,950	-	0.00%	0.00%	75.00	2,197,317,950	20.83%	20.93 %	BPBD
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	360	600,000,000	0.00	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung	7	3,500,000,000	3.00	1,385,484,007	-	0.00%	0.00%	3.00	1,385,484,007	42.86%	39.59 %	BPBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1,285	2,900,000,000	61.00	453,213,130	6,025,000,000	0.00%	0.00%	61.00	453,213,130	4.75%	15.63 %	BPBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,817,164,750		8,378,358,023	4,302,915,806	-	-	-	8,378,358,023	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4,950	35,000,000	65.00	4,940,000	-	0.00%	0.00%	65.00	4,940,000	1.31%	14.11 %	BPBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	720	1,330,000,000	156.00	445,224,369	300,000,000	0.00%	0.00%	156.00	445,224,369	21.67%	33.48 %	BPBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13,020	19,452,164,750	2616.00	7,928,193,654	4,002,915,806	0.00%	0.00%	2616.00	7,928,193,654	20.09%	40.76 %	BPBD

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,080,000,000		2,351,275,389		1,687,330,720	-	-	-	-	-	2,351,275,389	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	440	3,200,000,000	154.00	1,850,765,589		1,272,860,000			0.00%	0.00%	154.00	1,850,765,589	35.00%	57.84 %	BPBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	300	440,000,000	95.00	179,400,000		75,000,000			0.00%	0.00%	95.00	179,400,000	31.67%	40.77 %		
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	10	2,440,000,000	4.00	321,109,800		339,470,720			0.00%	0.00%	4.00	321,109,800	40.00%	13.16 %		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			39,825,297,588		13,257,472,650		4,099,895,550	-	-				13,257,472,650				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			3,255,000,000	86	595,789,761	85	1,000,000,000	65	-	76.47 %	0.00%	151.00	595,789,761		18.30 %	BPBD	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1,500	3,255,000,000	187.00	595,789,761		1,000,000,000			0.00%	0.00%	187.00	595,789,761	12.47%	18.30 %	BPBD	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			11,780,148,794		5,469,807,722		1,499,895,550	-	-	0.00 %	0.00%	0.00	5,469,807,722		46.43 %	BPBD	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	750	2,400,000,000	150.00	223,172,000		650,000,000			0.00%	0.00%	150.00	223,172,000	20.00%	9.30%	BPBD	

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	220	1,987,574,397	87.00	2,247,812,397		149,999,750			0.00%	0.00%	87.00	2,247,812,397	39.55%	113.09 %	BPBD	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	850	2,255,000,000	202.00	187,500,000		149,895,800			0.00%	0.00%	202.00	187,500,000	23.76%	8.31%	BPBD	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	25	1,750,000,000	8.00	282,206,648		150,000,000			0.00%	0.00%	8.00	282,206,648	32.00%	16.13 %	BPBD	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan Pasca Bencana Kab/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	160	400,000,000	5.00	97,404,000		150,000,000			0.00%	0.00%	5.00	97,404,000	3.13%	24.35 %	BPBD	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	10	2,987,574,397	87.00	2,431,712,677		250,000,000			0.00%	0.00%	87.00	2,431,712,677	870.00 %	81.39 %	BPBD	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			12,642,574,397		3,722,153,047		1,100,000,000		-	0.00 %	0.00%	0.00	3,722,153,047		29.44 %	BPBD	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	5	250,000,000	3.00	100,000,000		100,000,000			0.00%	0.00%	3.00	100,000,000	60.00%	40.00 %	BPBD	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	160	600,000,000	1.00	148,673,020		150,000,000			0.00%	0.00%	1.00	148,673,020	0.63%	24.78 %	BPBD	
	Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	220	6,987,574,397	204.00	2,595,630,237		400,000,000			0.00%	0.00%	204.00	2,595,630,237	92.73%	37.15 %	BPBD	

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70	3,255,000,000	89.00	608,519,740	250,000,000	0.00%	0.00%	89.00	608,519,740	127.14 %	18.69 %	BPBD
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	1,150,000,000	3.00	197,993,050	100,000,000	0.00%	0.00%	3.00	197,993,050	60.00%	17.22 %	BPBD
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	160	400,000,000	1.00	71,337,000	100,000,000	0.00%	0.00%	1.00	71,337,000	0.63%	17.83 %	BPBD
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			12,147,574,397		3,469,722,120	500,000,000	-	0.00 %	0.00%	0.00	3,469,722,120	28.56 %	BPBD
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	70	2,255,000,000	5.00	140,139,400	80,000,000	0.00%	0.00%	5.00	140,139,400	7.14%	6.21%	BPBD
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	25	2,250,000,000	6.00	273,538,000	80,000,000	0.00%	0.00%	6.00	273,538,000	24.00%	12.16 %	BPBD
	Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	160	2,400,000,000	3.00	147,445,000	80,000,000	0.00%	0.00%	3.00	147,445,000	1.88%	6.14%	BPBD
	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	220	4,987,574,397	88.00	2,800,501,447	130,000,000	0.00%	0.00%	88.00	2,800,501,447	40.00%	56.15 %	BPBD
	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	70	255,000,000	5.00	108,098,273	130,000,000	0.00%	0.00%	5.00	108,098,273	7.14%	42.39 %	BPBD
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			17,000,000,000		4,417,100,005	3,527,541,280	-			4,417,100,005			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			9,000,000,000		2,342,362,607	1,613,336,280	-			2,342,362,607			

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	3,250,000,000	14.00	813,444,440		525,000,000			0.00%	0.00%	14.00	813,444,440	23.33%	25.03 %	BPBD	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	60	1,250,000,000	14.00	237,255,000		150,000,000			0.00%	0.00%	14.00	237,255,000	23.33%	18.98 %	BPBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	350	2,250,000,000	124.00	769,650,060		600,729,000			0.00%	0.00%	124.00	769,650,060	35.43%	34.21 %	BPBD	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50	1,250,000,000	10.00	223,166,216		137,607,280			0.00%	0.00%	10.00	223,166,216	20.00%	17.85 %	BPBD	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	35	1,000,000,000	7.00	298,846,891		200,000,000			0.00%	0.00%	7.00	298,846,891	20.00%	29.88 %	BPBD	
	Investigasi Kejadian Kebakaran			250,000,000		100,000,000		-		-				100,000,000				
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang diteliti dan diuji	5	250,000,000	2	100,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	100,000,000	40.00%	40.00 %	BPBD	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			6,500,000,000		1,583,427,370		1,764,205,000	-	-				1,583,427,370				

	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	35	1,500,000,000	6.00	282,787,000		200,000,000			0.00%	0.00%	6.00	282,787,000	17.14%	18.85 %	BPBD	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	35	1,750,000,000	4.00	277,420,000		324,205,000			0.00%	0.00%	4.00	277,420,000	11.43%	15.85 %	BPBD	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	200	3,250,000,000	25.00	1,023,220,370		1,240,000,000			0.00%	0.00%	25.00	1,023,220,370	12.50%	31.48 %	BPBD	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1,250,000,000		391,310,028		150,000,000	-	-				391,310,028				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1,500	1,250,000,000	380.00	391,310,028		150,000,000			0.00%	0.00%	380.00	391,310,028	25.33%	31.30 %	BPBD	
				148,672,902,464		56,045,751,294		34,761,442,482		-				58,243,069,244				

2.2 Analisis Kinerja pelayanan PD

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh adalah sebagai berikut :

Tabel. T-C. 30.
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana		Indeks Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	77,50	78	78,90	79,50	77,50	78	78,90	79,50	81	
	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	5,11%	8,11%	100%	100%	5,11%	3,00%	12,11%	15,11%	15,11%	
	Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8,55%	10,55%	100%	100%	5,55%	10,55%	13,55%	16,55%	16,55%	
	Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	-	2	2	2	-	2	2	2	2	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana, hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampak dari penanganan penanggulangan bencana di daerah Kutai Kartanegara nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih berpedoman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:

1. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang komprehensif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
3. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.
4. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.

b. Dalam aspek Kelembagaan

1. Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu unsur pengarah.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri beberapa tahun, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
3. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll

4. Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari BPBD kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Dalam aspek Ketugasan:

1. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
2. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiap-siagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
3. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
4. Masih minimnya relawan siaga bencana.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
6. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
7. Laporan Data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar , sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu penyesuaian terhadap RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan terdapat kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD dan Pagu Anggaran OPD, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD **Tahun 2026** sebagai berikut

Tabel. T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.415.591.573	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				31.457.726.714
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		8.665.591.573	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		26.257.726.714
1	05	01	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		225.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000
1	05	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	250.000.000
1	05	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	150.000.000
1	05	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	100.000.000
1	05	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.350.875.098	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.365.510.239
1	05	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	700 Orang/bulan	4.130.875.098	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang /Bulan	13.874.510.239
1	05	01	2,0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	86.000.000

							Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
1	05	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	360.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6 laporan	45.000.000
1	05	01	2,0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				250.000.000
1	05	01	2,0 3	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	100.000.000
1	05	01	2,0 3	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	150.000.000
1	05	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				825.000.000
1	05	01	2,0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	50 Orang	75.000.000
1	05	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	150.000.000
1	05	01	2,0 5	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	50 Orang	150.000.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	5 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	5 Dokumen	75.000.000

1	05	01	2,0 5	11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	115 Orang	375.000.000
1	05	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				437.750.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.020.500.000
1	05	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10.500.000
1	05	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	155.000.000
1	05	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	32.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	155.000.000
1	05	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	100.000.000
1	05	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	42.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	100.000.000
1	05	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	350.000.000
1	05	01	2,0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	75.000.000
1	05	01	2,0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	37.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	75.000.000
1	05	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.054.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.104.000.000
1	05	01	2,0 7	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2.250.000.000
1	05	01	2,0 7	12	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	45.000.000	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	445.000.000
1	05	01	2,0 7	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	1.150.000.000

1	05	01	2,0 7	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	259.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.259.000.000
1	05	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.077.966.475	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.252.716.475
1	05	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	3.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	7.500.000
1	05	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	300.000.000
1	05	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.945.216.475	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.945.216.475
1	05	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.940.000.000
1	05	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	325.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	1.650.000.000
1	05	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	205.000.000
1	05	01	2,0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	85.000.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.750.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				5.200.000.000
1	05	03	2,0 1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				450.000.000

1	05	03	2,0 1	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 Orang	150.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 Orang	150.000.000
1	05	03	2,0 1	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	300.000.000
1	05	03	2,0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				550.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.250.000.000
1	05	03	2,0 2	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	100 Unit	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	100 Unit	150.000.000
1	05	03	2,0 2	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>	500 Orang	150.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>	500 Orang	150.000.000
1	05	03	2,0 2	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	10 Keluarga	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	10 Keluarga	150.000.000

1	05	03	2,0 2	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	4 Kawasan	200.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	4 Kawasan	150.000.000
1	05	03	2,0 2	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	25 Orang		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	25 Orang	150.000.000
1	05	03	2,0 2	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	250.000.000
1	05	03	2,0 2	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	2 laporan		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	2 laporan	100.000.000
1	05	03	2,0 2	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	3 Kawasan		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	3 Kawasan	150.000.000
1	05	03	2,0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.200.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	2.150.000.000
1	05	03	2,0 3	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar	1 Laporan	150.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar	1 Laporan	150.000.000

							Biasa Penyakit/Wabah Prioritas					Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		
1	05	03	2,0 3	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	150.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	150.000.000
1	05	03	2,0 3	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	450.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	750.000.000
1	05	03	2,0 3	07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal</i>	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal</i>	1 Dokumen	250.000.000
1	05	03	2,0 3	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis</i>	25 Orang	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis</i>	25 Orang	350.000.000
1	05	03	2,0 3	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273 Orang	250.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273 Orang	250.000.000
1	05	03	2,0 3	10	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000
1	05	03	2,0 3	11	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	150.000.000
1	05	03	2,0 4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				850.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				1.350.000.000

1	05	03	2,0 4	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>	1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,0 4	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	2 Dokumen	100.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	2 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,0 4	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	1 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,0 4	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	10 Laporan	300.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	10 Laporan	150.000.000
1	05	03	2,0 4	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi</i>	10 Orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi</i>	10 Orang	250.000.000
1	05	03	2,0 4	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)</i>	15 Orang	-	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)</i>	15 Orang	150.000.000
1	05	03	2,0 4	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan</i>	10 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan</i>	10 Kegiatan	100.000.000
1	05	03	2,0 4	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	10 Laporan	-	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	10 Laporan	100.000.000
1	05	03	2,0 4	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan</i>	2 Dokumen	100.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan</i>	2 Dokumen	150.000.000

							<i>dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>					<i>dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>		
1	05	03	2,0 4	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	150.000.000
					Jumlah				11.415.591.573	Jumlah				31.457.726.714

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang. Musrenbang adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, di situ ada proses timbal balik dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan adalah tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang adalah proses memajukan setiap daerah mulai dari Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat.

Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakat, pemerintah mengharuskan didalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diawali dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

Musrenbang RKPD Kutai Kartanegara digelar dalam rangka menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah propinsi, selain untuk mempertajam

indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten, serta guna menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah serta pendanaannya. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau **masyarakat tahun 2026** hasil dari Musrenbang Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyepakati usulan Kegiatan dari Kecamatan yaitu :

Tabel. T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
Pelatihan Relawan BALAKARCANA dan Masyarakat Peduli Api (MPA)						
1	Ardiansyah Kembang Janggut	ID SIPD: 2248750 Pelatihan BALAKARCANA bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan peran serta Masyarakat/Balakarcana dan Masyarakat Peduli Api dalam penanggulangan bencana #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan peran serta Masyarakat/Balakarcana dan Masyarakat Peduli Api dalam penanggulangan bencana	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
2	SAIMANSYAH Teluk Binkai	ID SIPD: 2265802 Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak, pelatihan relawan BALAKARCANA dan MPA di desa dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan relawan-relawan yang handal dan siap menghadapi bencana atau kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DESA TELUK BINGKAI KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Masyarakat akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak bencana. Selain itu, pelatihan ini juga dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar masyarakat dalam penanggulangan bencana	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
4	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373582 Perlu nya peningkatan kapasitas/pelatihan tim Relawan Balakarcana dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Liang Ulu #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Untuk pengetahuan kelompok Relawan Balakarcana dan MPA	2	Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
8	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2296690 Pelatihan Tanggap Darurat Bencana #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Dr. Nazir RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Pelatihan Relawan BALAKARCANA dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya kebakaran. Pelatihan tanggap darurat bencana di Jl. Dr. Nazir RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mendukung upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
9	HUMAIDI Lebak Cilog	ID SIPD: 2068667 Masih banyak yang belum tau tentang bahaya nya api #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	lebak cilong, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Relawan Peduli Api Desa	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
11	MUHAMMAD HASANI, S.Pd Sebulu Ilir	ID SIPD: 2190875 Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekosistem, dan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih intensif melalui keterlibatan masyarakat. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JALAN AHMAD YANI RT.006 DESA SEBULU ILIR KECAMATAN SEBULU KODE POS 75552, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
13	SHOLIMIN Karang Tunggal	ID SIPD: 2316595 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Karang Tunggal, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada • Koordinat: Tidak ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Lanjut	1	Prioritas Catatan : Pelatihan Relawan kami setujui dengan catatan menambah Pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)						
1	Ardiansyah Kembang Janggut	ID SIPD: 2248794 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran untuk mendukung peran serta Masyarakat/Balak arca dan Masyarakat Peduli Api dengan membantu penyediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: SUDAH TERBENTUK MASYARAKAT PEDULI API, LUASNYA LAHAN KBK	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
2	Sis Budinyoto Loa Sakoh	ID SIPD: 2215045 Belum tersedianya perlengkapan pemadam kebakaran yang lengkap dan memadai sehingga terkendala saat melakukan pertolongan #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Loa Sakoh RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Alat blm memadai	2	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
						pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
3	JUNAIDI Genting Tanah	ID SIPD: 2048358 permohonan pengadaan mobil DAMKAR #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Genting Tanah, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: KAWASAN PEMUKIMAN PADAT DAN JARAK ANTARA RUMAH BERDEKATAN	3	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
5	SISKA RIZKI AMALIA Semayang	ID SIPD: 2293476 Untuk mengatasi kebakaran lahan yang sering terjadi di wilayah desa #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Semayang , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Dengan adanya alat pemadam kebakaran dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani kebakaran. Hal ini akan berdampak pada pengurangan risiko kerugian akibat kebakaran, baik material maupun jiwa. Selain itu, pengadaan alat pemadam kebakaran juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.	2	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
6	Tommy, S.Sos,M.Pd Tuana Tuha	ID SIPD: 2287503 Belum adanya alat pemadam kebakaran yang lengkap #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Olah Raga 1 RT.011, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Dengan adanya alat pemadam kebakaran dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani kebakaran. Hal ini akan berdampak pada pengurangan risiko kerugian akibat kebakaran, baik material maupun jiwa. Selain itu, pengadaan alat pemadam kebakaran juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.	3	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
7	SAIMANSYA H Teluk Bingkai	ID SIPD: 2265993 Dengan pengadaan alat pemadam kebakaran yang memadai dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggi, desa dapat menjadi lebih aman dan terhindar dari risiko kebakaran yang merugikan. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DESA TELUK BINGKAI KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Dengan adanya alat pemadam kebakaran dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani kebakaran. Hal ini akan berdampak pada pengurangan risiko kerugian akibat kebakaran, baik material maupun jiwa. Selain itu, pengadaan alat pemadam kebakaran juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.	4	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
8	SUPYAN NOOR Pela	ID SIPD: 2064856 Pengadaan alat pemadam kebakaran menjadi sangat penting sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran. Dalam banyak kasus, kebakaran yang cepat ditanggulangi dengan alat yang tepat dapat menghindari penyebaran api lebih lanjut, meminimalkan kerusakan, serta menyelamatkan nyawa dan properti. Alat pemadam kebakaran yang memadai juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan keselamatan yang berlaku di berbagai sektor, baik di gedung-gedung #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan, Jembatan Ulin Rt 05, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Untuk Penunjang Penanggulangan Bencana	1	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
10	Rapi""i, S.Sos Loleng	ID SIPD: 2371237 Belum ada alat pemadam kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Belum ada alat pemadam kebakaran di Desa	3	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
11	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373605 Perlunya alat pemadam kebakaran menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran.	4	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
13	SEGER SANTOSO Sarinadi	ID SIPD: 2220092 Minimnya Alat Pemadam Kebakaran sehingga ketika Terjadi Kebakaran Pemernitah Desa dan Masyarakat Kekurangan Alat Bantu Pemadam #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Sari Nadi, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan:	2	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
18	SADARUDDIN K Salo Palai	ID SIPD: 2274556 Belum tersedianya perlengkapan alat pemadam kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: P	2	Prioritas Catatan : Usulan Kegiatan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan dapat disetujui dengan Catatan menambah pagu anggaran BPBD Tahun 2026
30	EKO IRWANSYAH Bunga Jadi	ID SIPD: 2346896 Belum adanya alat yang memadai di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Bunga jadi Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Diusulkan.....Tanda Tangan Proposal segera dilengkapi	7	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
32	Suwandi Batuq	ID SIPD: 1956250 Untuk mengantisipasi terjadi kebakaran pemukiman atau lahan pertanian , hutan di desa batuq. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Batuq, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada • Foto: Tidak ada • Koordinat: Tidak ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Pengadaan alat pemadam kebakaran di Desa Batuq sangat penting untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran pemukiman, lahan pertanian, dan hutan, serta meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran.	2	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
33	MADI Muara Enggelam	ID SIPD: 2236732 Sering terjadi kebakaran di hutan sehingga sulit di jangkau oleh relawan kebakaran maka dari itu memerlukan alat pemadam dan perahu beserta ces #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Muara Enggelam, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Kebutuhan Perlengkapan Relawan Api	1	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
34	EDI SURIYONO Lebak Mantan	ID SIPD: 2268812 BELUM TERPENUHINYA ALAT PEMADAM KEBAKARAN DESA LEBAK MANTAN #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JL DANYANG SUDI RT 3 DUSUN TANAH HARAPAN , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Kebutuhan Perlengkapan Relawan Api	2	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
35	HUMAIDI Lebak Cilog	ID SIPD: 2153780 daerah rawan kebakaran dan juga padatnya rumah penduduk yang jauh dari jangkawan air #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Lebak Cilog, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Kebutuhan Perlengkapan Relawan Api	3	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
38	AGUS DINA FITRIANI, SP Sari Jaya	ID SIPD: 2225176 Perlunya Pengadaan Mobil Pemadam #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya Pengadaan Mobil Pemadam	2	Prioritas Catatan : OPD Pelaksananya adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
40	AGUS DINA FITRIANI, SP Sari Jaya	ID SIPD: 2225182 Perlunya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla) #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sarijaya, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	4	Prioritas Catatan : Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan disetujui dengan catatan menambah pagu anggaran BPBD Tahun 2026
48	Eko Cahyono, S. Pi Mekar Jaya	ID SIPD: 2261356 Masih kurangnya sarana dan prasarana Masyarakat Peduli API di Desa Mekar Jaya #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Mekar Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat	2	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
49	SYAIBE Sanggulan	ID SIPD: 2321085 Kawasan pemukiman yang semakin padat, bangunan rata-rata terbuat dari kayu, yang mudah terbakar, rawan terjadi musibah kebakaran, untuk mengantisipasi musibah kebakaran, perlu kesiap siagaan dan peralatan yang memadai, berupa alat pemadam kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	desa Sanggulan, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan Kondisi dan kebutuhan Masyarakat	3	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
50	MUHAMMAD HASANI, S.Pd Sebulu Ilir	ID SIPD: 2190657 Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran, diperlukan pengadaan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar keselamatan dan kebutuhan di lokasi tertentu. Dengan adanya alat pemadam kebakaran yang memadai, diharapkan potensi kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JALAN AHMAD YANI RT.006 DESA SEBULU ILIR KECAMATAN N SEBULU KODE POS 75552, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: Usulan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat	4	Super Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
54	Isnaniah S, SH., MH Panji	ID SIPD: 2057757 Masih kurangnya alat pemadam Kebakaran seperti pompa air, selang dan lain2 di Balakarcana kel.Panji. #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Stadion Timur RT 10 , Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Koordinat: Tidak ada (Tidak diperlukan) • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: perlunya peralatan pendukung untuk menunjang kinerja balakrcana dikelurahan panji dalam menanggulangi kebakaran	1	Prioritas Catatan : Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran dapat disetujui dengan catatan menambah pagu anggaran BPBD Tahun 2026
56	Yahya Embalut	ID SIPD: 2253699 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RT.08 Dusun Pulau Yupa, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	1	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
57	SHOLIMIN Karang Tunggal	ID SIPD: 2316543 untuk mendukung peran serta masyarakat peduli api dalam membantu penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Karang Tunggal, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	2	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	CATATAN OPD
						BPBD Tahun 2026
58	Hermi Kuaria Loa Ulung	ID SIPD: 2309811 Meningkatkan efisiensi: dalam penanggulangan bencana.Meningkatkan efektifitas: dalam menyelamatkan korban bencana.Meningkatkan keselamatan: relawan dan korban bencana.Meningkatkan kepercayaan: masyarakat terhadap BPBD dan relawan #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Kantor Desa RT.010 Desa Loa Ulung, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal /Dok. Pendukung: Ada •Foto:Ada •Koordinat:Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	3	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026
59	Kuswara Suka Maju	ID SIPD: 2210286 perlu adanya penambahan alat pemadam kebakaran untuk team Damkar Desa Suka Maju #OPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Raya Samarinda - Sebulu RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Disepakati • Proposal / Dok. Pendukung: Ada • Foto: Ada • Koordinat: Ada • Sumber Dana: APBD Kabupaten Keterangan: lanjut	5	Prioritas Catatan : Usulan Pengadaan Alat pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat kami setujui dengan Catatan menambah pagu Anggaran BPBD Tahun 2026

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi "**Bangsa yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana**" secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;

2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah **daerah**, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Menindaklanjuti kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana dengan melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Alternatif strategi yang disajikan di atas selanjutnya dipilih untuk ditetapkan menjadi strategi jangka menengah BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah BPBD . Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel. 5
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BPBD
Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

STRATEGI	KEBIJAKAN
A. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 1. Meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana 2. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pengurangan Risiko Bencana 3. Penyusunan Peraturan Penyebaran Informasi Kebencanaan 4. Implementasi Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana 5. Meningkatkan Komitmen DPRD Terhadap Pengurangan Risiko Bencana dengan arah kebijakan	Mengarahkan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunandan meninternalisasikan peraturan Penanggulangan Bencana kedalam Kebijakan pembangunan lainnya
B. Meningkatkan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 1. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Penanggulangan Bencana 2. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Memperkuat Pendanaan Terhadap Dokumen Perencanaan
C. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 1. Perkuatan Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat 2. Sosialisasi pencegahan kesipasiagaan bencana pada tingkat kecamatan 3. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 4. Meningkatkan peran dan fungsi PUSDALOPS 5. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana	Perkuatan pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional

STRATEGI	KEBIJAKAN
6. Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 7. Meningkatkan manajemen pergudangan logistik penanggulangan bencana 8. Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan dan sumber energi untuk darurat	
D. Meningkatkan penanganan tematik kawasan rawan bencana 1. Meningkatkan Penataan Ruang Berbasis PRB 2. Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit, sekolah, Madrasah dan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya Aman Bencana 3. Meningkatkan Kapasitas Desa Tangguh Bencana	Mengarahkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam PRB
E. Peningkatan efektivitas pencegahan 1. Rehabilitasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman	
F. Pengembangan system pemulihan bencana 1. Meningkatkan Rehabilitasi dan Rekontruksi Infrasuktrur dan Pelayanan Publik pemerintah, Rumah Penduduk dan Penghidupan Masyarakat	
G. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana 1. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana 2. Peningkatan Sistem Peringatan Dini 3. Perkuatan Infrastruktur Evakuasi Bencana 4. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat 5. Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Darurat	Melibatkan Masyarkat dalam Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Penanggulangan Bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mampu melenting dari keterpurukan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana. Serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana”
maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Misi 1 : Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan 1: Meningkatkan Kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, dengan sasaran:

- a. Meningkatkan sarana berupa perlengkapan dan peralatan Damkar;

- b. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur yang bersertifikasi;
- c. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan ketrampilan unsur pendidik dan pelajar untuk mengantisipasi ancaman bencana.

Tujuan 2: Meningkatkan pencegahan ,pengurangan resiko bencana, peringatan dini dan mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana, dengan sasaran:

- a. Ketersediaan Data/Informasi Kebencanaan;
- b. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- c. Meningkatnya pengendalian operasional penanggulangan bencana di Kab. Kutai Kartanegara;
- d. Mengurangi resiko kebakaran dengan revisi/rehabilitasi instalasi listrik;
- e. Jenis Potensi Bencana.

Misi 2 : Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.

Tujuan : Meningkatkan Upaya Tanggap Darurat Bencana, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya efektifitas penanganan kedaruratan bencana;
- b. Ketersediaan kebutuhan masyarakat pada saat terjadi bencana.

Misi 3 : Meningkatkan upaya perbaikan, pemulihan semua aspek pelayanan publik dan pembangunan kembali

prasarana, sarana kelembagaan pemerintahan/masyarakat pada wilayah pascabencana.

Tujuan 1: Percepatan pemulihan kondisi kehidupan masyarakat (kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi) pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran:

- a. Berfungsinya kembali sarana/prasarana (fasilitas umum) dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana;
- b. Terbangunnya hunian sementara bagi korban bencana;
- c. Meningkatnya penanganan keadaan darurat secara cepat dan tepat.

Tujuan 2: Meningkatkan Kapasitas Pelayanan SKPD Penanggulangan Bencana Daerah, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Peraturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran di SKPD Penanggulangan Bencana Kab. Kutai Kartanegara;
- c. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- e. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Instansi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Faktor yang menjadi Bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendukung tercapainya target Indikator Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk “***Menurunkan Risiko Bencana***” ;
- b. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/ standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 (dua) program utama dan sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
			Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan/Material
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

4.3. Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal dikarenakan

- a. Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dalam satu tahun.
- b. Renja PD berfungsi sebagai panduan operasional untuk implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- c. Renja PD berisi rencana anggaran, target capaian kinerja, serta langkah-langkah pelaksanaan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.
- d. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN.
- e. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah.
- f. RKPD disusun berdasarkan visi, misi, dan program pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4.4. Rencana program dan kegiatan

Hasil Pemetaan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2026 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tabel – TC 33 sebagai berikut :

Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Rancangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			31.120.411.934					25.259.000.875	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31.120.411.934					25.259.000.875	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			31.120.411.934					25.259.000.875	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	75 Nilai	25.595.411.934				75 Nilai	19.709.000.875	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	100%	1.025.000.000				100%	1.050.000.000	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Dokumen	450.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN

						Seberang, Perjiwa					BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12 Laporan	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	150.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	12 Data	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Data	250.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 BeritaAca ra	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 BeritaAca ra	50.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi</i>	100%	8.610.284.400				100%	8.596.284.400	

			<i>Keuangan tepat Waktu</i>								
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	735 Orang/bulan	8.070.284.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		735 Orang/bulan	8.070.284.400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	90.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Dokumen	86.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	35.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	12 Laporan	360.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	360.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	4 Dokumen	55.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	350.000.000				100%	275.000.000	
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN

		Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD			Seberang, Perjiwa					BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		6 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		6 Laporan	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	505.000.000			-	100%	680.000.000	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	125 Paket	180.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		125 Paket	380.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Orang	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	25 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Orang	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN

		Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan			Seberang, Perjiwa					BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Orang	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	890.000.000			-	100%	945.000.000	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	45 Paket	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120 Paket	110.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	120 Paket	110.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	100 Paket	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	750 Paket	110.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	750 Paket	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1100 Paket	110.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1100 Paket	110.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Paket	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	40 Laporan	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	40 Laporan	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	6 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah	100%	8.952.411.059			-	100%	3.750.000.000	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	3 Unit	1.002.411.059	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Unit	1.500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	75 Unit	3.400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Hasil Kesepakatan Usulan Masyarakat dengan Perangkat Daerah sebanyak 16 Paket :ID SIPD: 2248750ID	75 Unit	1.300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

								SIPD: 2265802ID SIPD: 2373582ID SIPD: 2296690ID SIPD: 2293476ID SIPD: 2287503ID SIPD: 2265993ID SIPD: 2064856ID SIPD: 2371237ID SIPD: 2373605ID SIPD: 2220092ID SIPD: 2346896ID SIPD: 1956250ID SIPD: 2236732ID SIPD: 2268812ID SIPD: 2153780			
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	200 Unit	4.550.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	200 Unit	3.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan urusan Kantor	100%	2.212.716.475			-	100%	2.212.716.475	

	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10 Laporan	7.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	10 Laporan	7.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	260.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	260.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.945.216.475	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	12 Laporan	1.945.216.475	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik</i>	100%	3.050.000.000			-	100%	2.200.000.000	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	75 Unit	2.600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	75 Unit	1.600.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	120 Unit	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	120 Unit	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	3 Unit	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Unit	450.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	✓ <i>Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana</i> ✓ <i>Persentase Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i> ✓ <i>Persentase Pelayanan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana</i> ✓ <i>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	5.525.000.000				21,1 Persen	5.550.000.000	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana</i>	100 persen	200.000.000				21.11 Layanan	200.000.000	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>	200 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		200 Orang	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	100 persen	1.725.000.000				50 Persen	1.800.000.000	

	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	275 Unit	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		275 Unit	375.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota</i>	500 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		500 Orang	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	10 Keluarga	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Keluarga	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	4 Kawasan	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Kawasan	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	25 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Orang	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	12 laporan	175.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 laporan	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	7 Kawasan	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Hasil Kesepakatan Masyarakat dengan ID ID SIPD: 2248750ID SIPD: 2265802ID SIPD: 2373582ID SIPD: 2296690ID SIPD: 2068667ID	7 Kawasan	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

								SIPD: 2190875			
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	1.950.000.000				100 Persen	2.000.000.000	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>	2 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	7879 Orang	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		7879 Orang	650.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis</i>	30 Orang	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)		30 Orang	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	7879 Orang	650.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		7879 Orang	550.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu</i>	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	2 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen	1.650.000.000			-	-	1.550.000.000	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>	2 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	2 Dokumen	175.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	2 Dokumen	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2 Dokumen	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	4 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Laporan	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)</i>	15 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	15 Orang	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan</i>	4 Kegiatan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4 Kegiatan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	30 Laporan	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	30 Laporan	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H				31.120.411.934					25.259.000.875	

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 . Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah. mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai.
2. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.
3. Jumlah sumber daya aparatur bersertifikasi yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di daerah.
4. intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

5.3 Rencana tindak lanjut

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari Hasil Musrenbang Kabupaten. Penyempurnaan matrik Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah target setting dari pencapaian indikator kinerja.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efesiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tenggarong Seberang, 08 Desember 2025

Kepala Pelaksana,



SETIANTO NUGROHO AJI, SH, M, Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671027 199403 1 008